

RELASI ISLAM DAN NEGARA
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN
M. AMIEN RAIS)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

NURCAHYONO
NIM. 00360506

PEMBIMBING :

- 1. Dr. AINURROFIQ, M.A.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK

Konsep Negara Islam memang tidak ada bentuknya yang pasti, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada negara Islam. Didalam Islam, negara tidak lain hanyalah sebuah alat yang perlu bagi agama. al qur'an tidak menyebutkan satu konsep baku tentang sebuah negara dengan beberapa alasan; *pertama*, bahwasanya al qur'an pada prinsipnya adalah petunjuk etik bagi manusia, *kedua*, dalam hal ini institusi – institusi sosio politik dan organisasi manusia selalu berubah dari masa ke masa secara dinamis. Dalam perkembangannya, persoalan politik ketatanegaraan ini menjadi akar perdebatan dikalangan cendekiawan Muslim, politisi, dan dari kalangan akademisi sampai dengan saat ini. Berbagai teori muncul untuk memberikan satu *konklusi* tentang konsep negara dalam pandangan Islam, dan bagaimana Islam seharusnya menempatkan diri dalam sebuah sistem pemerintahan, yang tentu saja memiliki perbedaan teks dan konteks dengan sistem pemerintahan Islam pada masa Nabi.

Terdapat dua pilar pemikiran yang menjadi polemik Islam dan negara saat ini, yaitu: pemikiran dari kelompok *sekuleris* yang berpendapat bahwa urusan politik dan ketatanegaraan bukanlah bagian inti dari ajaran Islam itu sendiri, dan kelompok yang berpendapat bahwa Islam merupakan agama yang lengkap, sempurna dan komprehensif, sedangkan usaha untuk memisahkan urusan agama dan politik ketatanegaraan dalam hal ini sama sekali tertolak dalam ajaran Islam. Dua kutub pemikiran inilah yang pada perkembangan selanjutnya menjadi polemik kontroversial seputar relasi Islam dan negara di Indonesia sampai saat ini. Dengan melakukan pendekatan normatif historis, penulis melakukan analisa dan kajian dalam memberikan deskripsi tentang pemikiran – pemikiran dua tokoh cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais terkait persoalan relasi Islam dan negara di Indonesia ini pada khususnya.

Nurcholish Madjid dalam hal ini sering di indentikkan dengan faham *pluralisme*, *inklusifisme*, *modernis* dan *antisektarianisme*, karena konsep pembaharuan pemikiran Islam yang dikembangkan beliau pada tahun 1970-an. Beliau menilai bahwa terdapat perbedaan konteks antara Islam sebagai sebuah agama dan negara sebagai seperangkat sistem tata pemerintahan. Konsekwensi atas pembaharuan pemikiran Islam dalam hal ini adalah ide sekulerisasi dikalangan umat Islam. Puncak pemikiran beliau ini semakin tampak jelas, ketika beliau berpidato dengan tema: "*Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat*." Dengan ini pula beliau menolak usaha sekelompok militan Islam yang memperjuangkan ideologisasi Islam di Indonesia saat itu.

M. Amien Rais memandang bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan komprehensif, termasuk didalamnya urusan politik dan ke tatanegaraan. Dalam hal ini, faham sekulerisme atau dalam bentuk derivatifnya yang lain, sama sekali tertolak didalam Islam. Konsep *al Dīn wa al Daulah*, menjadi dasar pemahaman penting didalam menganalisa pemikiran beliau tentang sebuah konsep negara, dan bukan berarti berdiri di atas sebuah negara Islam. Negara yang menghormati hak asasi manusia, keadilan, yang jauh dari segala bentuk eksploitasi dan mampu menciptakan masyarakat yang egalitarian, maka negara seperti ini sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Dr. Ainur Rofiq, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Nurcahyono
Lamp : 1 bendel skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

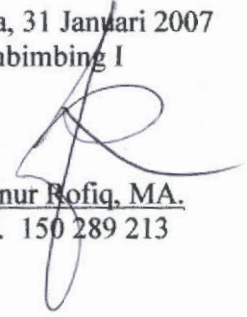
Nama : Nurcahyono
NIM : 00360506
Judul : "Relasi Islam dan Negara (Studi Komparatif Pandangan
Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais)"

Sudah layak diajukan, guna memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Januari 2007
Pembimbing I


Dr. Ainur Rofiq, MA.
NIP. 150 289 213

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Nurcahyono
Lamp : 1 bendel skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami, skripsi saudara :

Nama : Nurcahyono
NIM : 00360506
Judul : "Relasi Islam dan Negara (Studi Komparatif Pandangan Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais)"

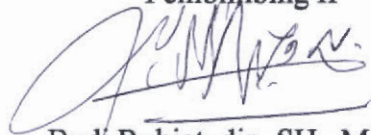
Sudah layak diajukan, guna memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Januari 2007

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.

NIP. 150 300 640

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
RELASI ISLAM DAN NEGARA
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN
M. AMIEN RAIS)

Yang disusun oleh:

NURCAHYONO
NIM. 00360506

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada tanggal: 29 Muharram 1428 H / 17 Februari 2007 M. dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awwal 1428 H
11 April 2007 M.



Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D.
NIP. 150 240 524

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 639

Pembimbing I

Dr. Ainurrofiq, M. Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 640

Penguji I

Dr. Ainurrofiq, M. Ag.
NIP. 150 289 213

Penguji II

Drs. Ocktoberrinsyah, M. Ag.
NIP. 150 289 435

MOTTO

"Jangan Pernah Berputus Asa Hanya Karena Satu Kegagalan"



*"Waktu Yang Telah Berlalu, Tak Kan Terulang Dimasa
Mendatang"*



"Optimislah Kita Mampu Membuat Satu Perubahan"



"Dengan Berfikir, Kerja Keras dan Pantang Menyerah !!"

Halaman Persembahan



Skripsi ini Penyusun Persembahkan Kepada:

**Almamater Tercinta
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

KATA PENGANTAR

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. yang hanya karena rahmat, hidayah dan inayah-Nyalah, penyusun dapat menyelesaikan kripsi ini sampai akhir. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada Rosulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah menuju jalan Allah, dengan Islam.

Skripsi ini tidak akan pernah mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dorongan secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu perkenankan penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Agus Moh. Najib, M.Hum., dan bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum. Selaku ketua dan sekretaris jurusan, yang telah membantu dalam memberikan pengarahannya dalam menyelesaikan studi penulis.
3. Bapak Dr. Ainur Rofiq, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, kritik dan saran kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap dosen dan staf karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membimbing penyusun selama menjalani masa studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ayahanda, Bp. Taryono (*Alm.*), semoga amal ibadahnya diterima disisi-Nya dan Ibunda tercinta, Ibu Rakhimah, yang dengan restu dan keihlasannya, telah memberikan segala yang beliau miliki, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kakakku Nuraini Kurniawati dan adikku Ahmad Wahyudin yang telah memberikan motivasi dan inspirasi tersendiri bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kekasihku, Nur Hidayati yang dengan segala ketulusan dan kesetiaannya, mendampingi penulis sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Rekan seperjuangan di SOMMPRET dan KARISMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh teman-teman struktur dan staf 'Maskumambang' atas semua kritik dan sarannya.

Dan akhirnya, penyusun hanya dapat berdo'a semoga segala bantuan, dorongan, bimbingan, pelayanan, saran dan kritik yang membangun tersebut mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi penyusun sendiri.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Muharram 1428 H.
31 Januari 2007 M.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa,	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha'	kh	ka – ha

د	Dal	d	de
ذ	zai	ẓ	zet dengan titik di atas
ر	ra'	f	er
ز	zai	z	zèt
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es – ye
ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i

-----	Dammah	u	u
-------	--------	---	---

Contoh :

كتب → kataba

سئل → su'ila

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatḥah dan ya	ai	a – i
وَ	Fatḥah dan wau	au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa

حول → ḥaula

c. **Vocal Panjang (maddah) :**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	Dammah dan ya	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → *qāla*

قيل → *qīla*

رمى → *ramā*

يقول → *yaqūlu*

3. Ta' Marbutah

a. Transliterasi *ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi *ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun , transliterasinya adalah "h".

Contoh :

طلحة → *talḥah*

- c. Jika *ta' marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbutah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh :

روضة الأطفال → *raudatul aṭfāl* atau *raudah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnatul Munawwarah* atau

al-Madīnah al-Munawwarah

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرُّ → *al-birru*

5. Kata Sandang " ال "

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu " ال ". Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ ال ” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh :

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh :

القَلَمُ → *al-qalamu*

البَدِيعُ → *al-badi'u*

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-Nau'u*

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muḥammadun illā Rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranaliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKS	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xviii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II. PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA

A. Biografi Nurcholish Madjid	19
B. Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Islam dan Negara	25

BAB III. PEMIKIRAN M. AMIEN RAIS TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA

A. Biografi M. Amien Rais	42
B. Pemikiran M. Amien Rais Tentang Islam dan Negara	48

BAB IV. ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN M. AMIEN RAIS TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA

A. Analisis Terhadap Konsep Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Relasi Islam dan Negara	69
B. Analisis Terhadap Konsep Pemikiran M. Amien Rais Tentang Relasi Islam dan Negara	72
C. Analisis Komparatif Pemikiran Nurcholish Madjid Dan M. Amien Rais Tentang Relasi Islam dan Negara	74

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80

DAFTAR PUSTAKA

82

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Terjemahan	I
B. Biodata Tokoh	II
C. Data Pribadi	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan akademis seputar relasi Islam dan negara sampai saat ini telah memicu '*konflik intelektual*' Timur dan Barat yang dalam perkembangan selanjutnya menamakan dirinya sebagai golongan '*Nasionalis Islam*' dan '*Nasionalis Sekuler*'.¹ Islam sebenarnya telah meletakkan satu pondasi yang kokoh dalam membangun sebuah tata pemerintahan negara, yaitu pada waktu Muhammad SAW memimpin Madinah dengan disepakatinya Piagam Madinah² atau piagam tertulis antara orang-orang muslim Muhajirin bersama Anshor dan kaum Yahudi bersama sekutunya.³ Adapun mengenai pengakuan dirinya sebagai seorang pemimpin, sudah beliau terima ketika disepakatinya *Ba'iat al - 'Aqābah* pertama (621 M) dan *Ba'iat al - 'Aqābah* kedua (622 M).⁴

Dalam konteks Madinah sebagai sebuah negara, Muhammad SAW mempunyai peran ganda, sebagai kepala pemerintahan sebuah negara sekaligus sebagai *hakam* yang merupakan manifestasi beliau sebagai Rasul utusan Allah

¹ M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm.xi.

² Piagam Madinah oleh banyak pakar politik disebut sebagai Konstitusi Negara pertama dalam Islam. Dari 47 butir yang ada di dalamnya, tidak ada yang menyebutkan agama Negara. Kandungan tiap butirnya mayoritas hanya berisikan tentang aturan-aturan hubungan *intern* beragama dan hubungan dengan umat agama lain.

³ H. Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. ke-5, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm.10-15

⁴ Syuyuti J. Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-qur'an*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.71

SWT. Syari'at Islam menjadi dasar tata pemerintahan negara pada waktu itu, yang selanjutnya sistem khilafah Islam dipegang oleh sekian khālifah, termasuk di dalamnya yang dikenal sebagai *al-Khulafā al-Rāshyidūn* (661-1924 M).⁵

Masa *khilafah* Islam ini berakhir bersamaan dengan runtuhnya sistem kekhālifahan yang dihapus oleh Majelis Nasional Turki (1924 M) yang pada waktu itu dipegang oleh Kemal at-Taturk.⁶ Sebelumnya dia juga telah menghapus sistem Kesultanan Turki (1922 M). Hal ini ternyata menimbulkan dampak yang begitu besar pada sistem pemerintahan negara yang secara struktural dan konstitusional berubah secara diametrikal. Puncaknya adalah pernyataan Konstitusi Negara bahwa Republik Turki adalah Negara Sekuler.⁷ Sekulerisasi Turki yang ditandai dengan jatuhnya *Imperium 'Abāssiyah* pada awal abad ke-20, ternyata memberikan wacana baru dalam khasanah pemikiran Islam Kontemporer. Setidaknya hal inilah yang melatarbelakangi perdebatan kontroversial seputar relasi Islam dan negara sampai saat ini.

Pada dasarnya Al-qur'an, seperti yang tersirat salah satu firman Allah dalam surat al Hujurāt, ayat: 10, Islam mengajarkan doktrin ikatan spiritual universal antar orang beriman. Akan tetapi dengan jumlah penduduk muslim yang

⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah khilafah, imāmah dan al-mulk, ketiganya atau dalam bentuk derivatifnya dijumpai dalam Al-qur'an. Perkataan khilafah pada umumnya dipandang sinonim dengan perkataan al-imāmah dalam makna institusi kepemimpinan politik. Secara etimologis, khilafah berasal dari akar katayang berarti "*datang sesudah seseorang*." Secara teknis, khilafah menjadi kepala institusi pemilihan pengganti Nabi sebagai kepala komunitas Islam di Madinah. Dalam literatur klasik, gagasan suksesi mengandung empat unsur pokok, yaitu: Pendahulu (yang digantikan), Pengganti, sasaran suksesi; serta hak dan kewajiban yang timbul dari suksesi.

⁶ Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyyah dan Realitas Insaniyyah*, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Group, 1999), hlm. 157.

⁷ *Ibid.*, hlm.123-124

sedemikian banyak dan tersebar di berbagai negara, mungkinkah diciptakan satu pemerintahan muslim yang ketat dengan seorang kepala negara? atau dengan kata lain konsep negara Islam terwujud dalam realitas empiris, kondisi sosial politik saat ini?

Dalam konteks ini, A.Syafi'iy Ma'arif mengatakan bahwa hal itu jelas tidak mungkin, karena idealitas dan realitas yang terjadi memiliki perbedaan teks dan konteks yang sangatlah kecil kemungkinannya untuk dapat dipertemukan.⁸ Beliau lebih setuju dengan solusi yang ditawarkan 'Ibn Taimiyyah,⁹ ketika *Imperrium 'Abbasiyah* jatuh pada pertengahan abad ke-13, dengan menciptakan Liga Bangsa-Bangsa Muslim yang longgar secara organisasi, tapi dengan landasan yang solid berupa persaudaraan imani universal yang tidak boleh dibinasakan oleh perbedaan politik kontemporer antar negara muslim.

Berbeda dengan pandangan Syafi'iy Ma'arif, Abul a'la al-Maududi (1903-1979 M) lebih mengidealkan kehidupan kenegaraan umat Islam semasa *al-Khūlafā' al-Rāsyhidun*. Prinsip Supremasi Syari'ah dalam hal ini menjadi landasan utama dan pokok bagi pelaksanaan tata pemerintahan sebuah negara. Artinya bahwa Negara Islam menjadi alternatif kunci pada pokok-pokok pemikiran beliau.¹⁰ Lebih jauh Al-Maududi bahkan mewajibkan kaum muslim untuk berjuang menegakkan Negara Islam. Konsepsi ini bertolak dari sebuah

⁸ Syafi'iy Ma'arif, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.186

⁹ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 173

¹⁰ Al-Maududi memberikan satu pembedaan yang substansial antara Negara Muslim dan Negara Islam. Suatu Negara muslim adalah semua Negara yang diperintah oleh kaum muslim. Sedangkan disisi lain, Negara Islam beliau meknakan sebagai sebuah Negara yang bertekad untuk melaksanakan urusan-urusan kenegaraannya sejalan dengan tuntutan wahyu serta mengakui kedaulatan Allah SWT, hukum-Nya dan yang mengabdikan segala sumber daya demi tujuan ini.

teori yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, totalitas dan komprehensif.¹¹ Islam tidak semata berbicara masalah-masalah akidah dan ritualitas *an-sich*, Islam juga tidak menyetujui penyekatan antara agama dan politik. Akan tetapi Islam menginginkan pelaksanaan politik selaras dengan tuntunan yang telah diberikan agama dan menggunakan negara sebagai pelayan Tuhan.¹² Dua kutub pemikiran Politik Islam klasik dan kontemporer inilah yang selanjutnya mewarnai perdebatan menarik seputar Relasi¹³ Islam dan Negara sampai dengan abad ke-20 ini.

Berbagai usaha *rekonstruksi* dan *revitalisasi* konsep pemikiran Negara Islam di Indonesia sendiri telah muncul dan menjadi polemik yang cukup menarik dikalangan cendekiawan muslim. Polemik antara Soekarno dan Moehammad Natsir setidaknya ikut mewarnai awal perdebatan kontroversial yang terjadi pada sekitar tahun 1940-an.¹⁴ Tipologi pemikiran Soekarno lebih cenderung

¹¹ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern; Respons dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: PT. Media Cita, 2000), hlm. 206

¹² Dalam teorinya tentang Negara Islam, al-Maududi meletakkan tiga dasar utama sebuah Negara dalam Islam, yaitu: *pertama*, Islam adalah agama paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur segala segi kehidupan termasuk kehidupan politik. Oleh karenanya tidak perlu dan bahkan dilarang meniru sistem kehidupan Barat, cukup berkiblat pada pola politik semasa *al-Khulafa al-Rahsyidun*. *Yang kedua*, kekuasaan tertinggi yang dalam istilah politik disebut sebagai kedaulatan adalah ditangan Allah dimuka bumi. *Yang ketiga*, bahwasanya sistem politik Islam adalah sebuah sistem universal, tidak mengenal batas dan ikatan-ikatan geografis, bahasa dan kebangsaan.

¹³ Dalam studi ini, istilah 'relasi' diartikan sebagai hubungan, perhubungan, pertalian. Lihat: *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 830

¹⁴ A.Suhelmi Yahya, *Polemik Negara Islam Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 72 dan H.Munawir Sadzali, *Islam dan...*, hlm. 191. Perdebatan kedua tokoh negarawan tersebut dimulai dengan munculnya artikel Soekarno yang menulis tentang "Apa sebab Turki memisahkan Agama dan Negara?" Dalam artikelnya Soekarno terkesan ingin memisahkan Agama dan Negara dalam dua kutub yang berlainan. Selanjutnya dalam artikel yang sama, sebagai sebuah respons apologetiknya, beliau secara tegas menolak ide dan konsep pemikiran yang dituangkan Soekarno. Menurutnya, bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif termasuk pola politik Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan darinya.

dipengaruhi oleh konteks Turki dengan sekularisasinya. Sedangkan buah ide pemikiran Moehammad Natsir tentang Relasi Islam dan Negara lebih cenderung mengambil ide-ide pokok yang dilontarkan oleh A.A. al-Maududi.

Munculnya dua rumusan pemikiran dari kedua tokoh negarawan tersebut ternyata belum mampu mencairkan konflik intelektual seputar relasi Islam dan Negara dikalangan cendekiawan muslim pada waktu itu. Terdapat beberapa substansi masalah yang belum terjawab atas polemik-polemik tersebut, yaitu: “Bagaimana bentuk dan isi negara dalam Islam? dan bagaimana seharusnya Islam menempatkan diri dalam tata pemerintahan sebuah institusi negara? serta perlukah *revitalisasi* konsep Negara Islam dalam realitas empiris, peta perpolitikan Nasional di Indonesia sekarang ini?”

Dalam hal ini, Nurcholish Madjid berusaha menuangkan rumusannya yang lebih merupakan sebuah respon *apologetik* atas gerakan-gerakan aktifis Masyumi¹⁵ yang ngotot untuk memperjuangkan ideologisasi Negara Islam di Indonesia. Terdapat dua rumusan pemikiran¹⁶ yang menjadi landasan beliau merumuskan teorinya tentang Islam dan Negara. *Pertama*, Universalisme Islam yang merupakan refleksi realitas sosiologis yang memandang bahwa Islam lebih banyak mengajarkan etika. *Kedua*, Modernisme Islam yang identik dengan

¹⁵ Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) berdiri pada tanggal 17 November 1945. dalam salah satu AD/ART-nya menyebutkan bahwa partai baru itu bertujuan menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia dan agama Islam serta melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan. Pada tanggal 6 Juli 1947 Masyumi sebagai partai politik terbesar saat itu mengeluarkan sebuah manifesto politik yang salah satunya menyebutkan bahwa Masyumi berusaha menambah tersiarnya ideologi Islam dikalangan masyarakat Indonesia. Masyumi juga berusaha memasukkan ide untuk mengganti ideologi Negara dengan ideologi Islam.

¹⁶ Agus Edy Santoso, *Tidak ada Negara Islam; Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Mohammad Roem*, (Jakarta: Jambatan, 1997), hlm.xxvii

rasionalisasi dan sekularisasi. Arah pemikiran beliau tentang konsep relasi Islam dan negara ini semakin tampak jelas lagi manakala beliau menyampaikan sebuah pidato yang mengangkat tema: “*Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat*.”¹⁷

Nurcholish Madjid juga pernah menuliskan dalam teorinya bahwa secara normatif, baik dalam Al-qur'an maupun as-Sunnah, tidak terdapat perintah yang mutlak untuk mendirikan Negara Islam.¹⁸ Lebih jauh beliau juga menolak adanya partai politik yang dijadikan sebagai sebuah sarana perjuangan Islam. Berangkat dari analisis itu pula beliau menentang gagasan Negara Islam¹⁹ yang terus diperjuangkan oleh aktifis-aktifis Masyumi yang dipelopori oleh Mohammad Natsir, Agus Salim, dan rekan-rekannya.

Berangkat dari sebuah asumsi bahwa Islam adalah agama yang lengkap, sempurna dan komprehensif, sehingga tidak mungkin ditancapkan pada realitas sosial tanpa pedang penolong, M. Amien Rais menganggap bahwa negaralah yang menjadi pedang penolong.²⁰ Dalam konsepsi ini beliau melihat Islam sebagai “*al*

¹⁷ M. Rusli Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 206. dalam pidatonya, beliau menyampaikan empat unsure pokok pembaharuan Islam, yaitu: Liberalisasi pemikiran keagamaan (ajaran Islam), sekularisasi dan Gagasan tentang “*Islam Yess, Partai Islam No*” serta Sosialisme.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 116. Beliau juga berusaha menjinakkan atau mengobjektifasikan Islam Politik yang merupakan pembacaan atas antropologi politik yang beliau selaraskan dengan setting sosio-kultural masyarakat Indonesia.

¹⁹ Firdaus Syam, *Amien Rais: Politisi yang merakyat dan Intelektual yang Shaleh*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm.170

²⁰ A.Syafi'iy Ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.183. Konsep ini juga sesuai dengan hampir semua penulis modern seperti: M.Yusuf Musa, J.Schacht, C.A.Nlimo dan H.A.R.Ghibb.

Dīn wa al Daūlah” (Agama dan Negara).²¹ Di sisi lain, beliau menolak konsep negara Islam seperti halnya Nurcholish Madjid.²² Namun demikian beliau menolak ide *sekularisasi* atau *sekulerisme* seperti yang dipropagandakan oleh cendekiawan muslim Nurcholish Madjid tersebut, karena keterkaitan secara *inheren* antara Islam dengan persoalan-persoalan sosial politik.²³

Hal inilah yang memberikan daya tarik bagi penyusun untuk menggali lebih jauh titik-titik krusial yang membedakan tipologi dan arah pemikiran seputar relasi Islam dan Negara dari kedua tokoh cendekiawan muslim tersebut, serta mencari bentuk dan konsep negara dalam Islam dalam pandangan Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais.

²¹ Teori ini bukan berarti bahwa bentuk negara yang ada dalam konsep Islam adalah negara Islam yang meletakkan landasan konstruksi Syari’ah sebagai dasar negara. Beliau memberikan sebuah pemahaman bahwa sebagai agama yang lengkap dan *komprehensif* Islam sebenarnya juga mempunyai konsep-konsep, yang diakuinya sebagai sebuah landasan elementer sebuah Negara. Disini Islam tidak mengenal dikotomisasi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk didalamnya, kehidupan berpolitik bagi umatnya. Itu semua merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

²² Firdaus Syam, *Amien Rais; Politisi yang Rakyat dan Intelektual Yang Shaleh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 181. Konsep Negara Islam menurut beliau tidak ada dalam Islam, dalam Al-qur’an maupun Sunnah rasul seperti halnya yang dituangkan oleh Nurcholish Madjid. Yang terpenting menurut beliau adalah suatu Negara menjalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan masyarakat yang egalitarian yang jauh dari eksploitasi dari pihak manapun.

²³ Amien Rais, *Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan, Cet.1*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.77. Beliau mendeskripsikan bahwasanya meskipun sekularisasi dicoba untuk dibedakan dengan sekulerisme dengan alasan yang terakhir ini adalah ideologi sedang yang pertama merupakan proses sosial yang sifatnya *Open ended*, akan tetapi pada dasarnya sekularisasi juga merupakan ideologi, yaitu ideologi *sekulerisasionisme* yang ingin menjauhkan urusan agama dengan urusan politik. Padahal menurut beliau persoalan agama dan politik justru saling bersatu.

B. Pokok Masalah

Dari sekian banyak teori tentang Relasi Islam dan Negara, baik dari kalangan *Nasionalis Islam* maupun *Nasionalis Sekuler*,²⁴ serta *reinterpretasi* Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais, maka dapat penyusun ambil beberapa pokok masalah yang dijadikan bahan kajian dalam skripsi ini. Di antara substansi masalah pokok itu adalah :

1. Bagaimanakah bentuk negara dalam Islam menurut pandangan kedua tokoh tersebut?
2. Apa yang melatarbelakangi perbedaan teori dari kedua tokoh tersebut dalam menginterpretasikan teorinya tentang relasi Islam dan Negara?
3. Bagaimana tentang konsep Negara Islam yang diperjuangkan oleh sekelompok *Islam Militan*, apakah masih relevan untuk diperjuangkan menurut pandangan kedua tokoh tersebut?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Berangkat dari pokok masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Mendeskripsikan serta memberikan analisis terhadap pandangan dari kedua tokoh tersebut dalam merumuskan teorinya tentang konsep negara di dalam agama Islam.

²⁴ Pengelompokan ini mulai muncul di Indonesia, setidaknya ketika terjadi perdebatan menarik seputar Relasi Islam dan negara dari kalangan *Islamis* dan *sekuleris* pada waktu penetapan dasar Negara RI oleh Badan Konstituante. Golongan Islamis diwakili oleh Agus Salim dan M. Natsir, sedangkan golongan *sekuleris* terwakili oleh tokoh negarawan Ir. Soekarno.

2. Menelusuri persamaan dan perbedaan pandangan dari kedua tokoh tersebut tentang konsepsi Islam dan Negara.
3. Menemukan formulasi yang tepat tentang Relasi Islam dan Negara sebagai bahan kajian dalam bidang keilmuan saat ini.

Adapun skripsi ini diharapkan akan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah keilmuan Islam khususnya dalam bidang politik ketatanegaraan dengan memberikan analisis deskriptif yang lebih jelas dan konkrit terhadap pandangan kedua tokoh cendekiawan muslim tersebut.

D. Telaah Pustaka

Perdebatan intelektual mengenai Relasi Islam dan Negara serta kontroversi pemikiran Negara Islam sebenarnya telah berlangsung lama,²⁵ serta melahirkan berbagai teori dengan paradigma yang berbeda. Banyak karya sastra berupa buku, karya-karya ilmiah dan artikel-artikel di majalah serta tulisan di media yang

²⁵ Pada fase pertama awal kemunculan ide Negara Islam, muncul beberapa tokoh cendekiawan muslim ternama seperti: Syekh Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Shekh M.Rhasyid Ridha, dan tokoh teravokal Maulana A.A.Al-Maududi, yang berpendirian bahwa Islam sebenarnya bukanlah semata-mata hanyalah agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut urusan manusiadan Tuhan-Nya *an-sich*. Namun sebaliknya bahwa Islam sebenarnya adalah agama yang sempurna dan komprehensif yang didalamnya termasuk juga pengaturan kehidupan bernegara. Kemudian muncul tokoh terkemuka Ali Abd al-Raziq dan Dr.Thaha Husein yang berpendapat bahwa Islam sebenarnya seperti dalam pengertian Barat, hanya mengatur kehidupan keagamaan tanpa ada aturan dalam urusan ketatanegaraan. Fase selanjutnya, yang lebih merupakan sebuah respons apologetik atas pendapat dari dua golongan tersebut, muncul Dr.M.Thaha Husein Haikal yang menolak bahwasanya Islam adalah agama yang serba lengkap, namun beliau juga menolak anggapan yang mengatakan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya *an-sich*. Aliran ini berpendapat bahwa Islam sebenarnya tidak mengatur sistem ketatanegaraan, akan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di Indonesia sendiri, polemik ini muncul sudah sebelum kemerdekaan RI, yaitu pada waktu penetapan ideologi bangsa oleh BPUPKI. Polemik antara Soekarno, Dr.Radjiman, M.Hatta, M.Yamin serta tokoh-tokoh lain yang menyertai kaum Nasionalis dengan M. Natsir, Ki Bagus Hadi Kusuma, Kahar Muzakkar dan tokoh-tokoh negarawan dari kelompok pembela dasar Islam lainnya. Jauh sebelum itu antara pimpinan Sarekat Islam (SI) dengan Dr. Sukiman Wirjo Sandjojo pada tahun 1920-an juga telah berbicara tentang suatu kekuasaan pemerintahan Islam.

mengangkat tema tersebut. Tidak terkecuali Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais sebagai tokoh sentral dalam skripsi ini, juga memberikan analisisnya sebagai sebuah respon akademik dalam mengeliminir polemik Islam dan Negara yang masih menjadi kontroversi dikalangan kaum intelektual muslim saat ini.

Nurcholish Madjid dalam salah satu karyanya menyebutkan bahwa sebenarnya urusan politik ketatanegaraan di dalam Islam bukanlah termasuk inti dari ajaran Islam itu sendiri.²⁶ Beliau juga secara terang-terangan menggunakan makna kata *sekulerisasi*²⁷ sebagai salah satu elemen kunci pemikiran beliau serta menolak konsep Negara Islam.²⁸ Sekulerisme Nurcholish Madjid semakin tampak jelas ketika beliau dalam salah satu bukunya mengatakan bahwa: "... orang tidak bicara masalah Negara Islam lagi. Negara Islam itu eksklusif tidak inklusif."²⁹

²⁶ Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan; Artikulasi nilai-nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 192

²⁷ M.Deden Ridwan, *Gagasan Nurcholish Madjid; Neo Modernisme Islam dalam Wacana Tempo dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Belukar Budaya, 2002), hlm.155. sekulerisasi dalam pengertian beliau dalam hal ini adalah membebaskan masyarakat dari belenggu tahayul dalam beberapa aspek kehidupannya dan bukan berarti penghapusan orientasi keagamaan dalam norma-norma dan nilai kemasyarakatan itu. Substansi sekulerisasi menurutnya lebih jauh adalah memecahkan dan memahami kehidupan dunia dengan menggunakan rasio. Jadi sekulerisasi tidak dapat dipisahkan dengan rasionalisasi dan desakralisasi.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 161. Alasan beliau bahwasanya konsep Negara Islam itu tidak ada dalam Al-qur'an dan Sunnah rasul. Sikap ini juga merupakan sebuah *elaborasi* paradigma baru terhadap gagasan sekulerisasi atau desakralisasi yang beliau propagandakan sebelumnya. Seperti pada waktu beliau menyampaikan pidatonya didepan Generasi Muda Islam di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1970 yang mengangkat tema: "*Keharusan Pembaharuan Pemikiran dalam Islam dan Masalah Integrasi Umat.*" Sehingga muncul sebuah *plart form* politik : 'Islam Yes, Partai Islam No'

²⁹ Nurcholish Madjid, *Dialog Keterbukaan; Artikulasi nilai-nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm.173

M. Amien Rais, dalam hal ini juga menolak adanya konsep Negara Islam.³⁰ Akan tetapi disisi lain beliau tetap mengakui bahwa Islam adalah *Dīn* dan *Daūlah* (Agama dan Negara)³¹ yang merupakan *implementasi* dari sebuah agama yang lengkap dan *komprehensif*. Dengan landasann fikir seperti ini, beliau secara tegas menolak adanya faham sekulerisme³² yang berusaha mendikotomisasi kehidupan duniawi dan ukhrowi, immanen dan transendental, profan dan sakral. Yang kesemuanya itu menurut beliau hanya akan menghasilkan manusia modern yang memiliki kepribadian pecah atau '*Split Personality*'.³³

Tijani Abd. Qadir Hamid dalam salah satu karyanya³⁴ menjelaskan bahwa secara *aksiomatik*, negara merupakan satu kekuasaan sentral pemaksaan dan 'Negara Allah' tidak ada wujudnya dalam Al-qur'an.³⁵ Begitu juga Thoha

³⁰ Amien Rais, Putra Nusantara: *Mohammad Amien Rais*, (Singapore: Stanford Press, 1999), hlm.11. Mengenai hal ini beliau secara tegas memberikan alasan bahwa dalam Al-qur'an maupun Sunnah tidak ada yang mengatakan tentang bentuk Negara (Islam) atau mengenai kewajiban seorang muslim, baik secara moral maupun politis untuk mendirikan Negara Islam. Hanya saja didalam Al-qur'an Allah mengajarkan bahwa sebagai umat yang beriman, kita harus menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan yang sifatnya *multidimensional*, yang meliputi keadilan hukum, sosial, ekonomi, politik dan keadilan dalam pendidikan.

³¹ Syafi'iy Ma'arif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.183. Konsep ini juga sesuai dengan pendapat hampir semua penulis modern, seperti: M.Yusuf Musa, J.Schact, CA. Nlimo, dan HAR. Ghibb. Artinya bahwa pemisahan antara agama dan negara tidak dapat diterima. Syari'ah dalam Islam bersifat *inhern*: al-qur'an dan Sunnah memberikan Syari'ah, dan negara memperkuatnya.

³² Sekulerisme menurut beliau merupakan suatu faham atau ideologi hidup yang mengajarkan bahwa agama merupakan masalah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan urusan kemasyarakatan, seperti masalah politik, ekonomi, kebudayaan maupun Iptek. Beliau melihat sekulerisme dan sekulerisasi dengan makna yang berbeda. Sekulerisasi merupakan suatu proses yang secara lambat laun akan menuju juga pada sekulerisme yang merupakan sebuah faham yang sama sekali tertolak dalam ajaran Islam, dalam Al-qur'an maupun Sunnah rasul.

³³ M.Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm.76

³⁴ Tijani Abd Qadir Hamid, *Pemikiran Politik Islam Dalam Al-qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 262

³⁵ Teori ini mirip dengan teori kekuasaan yang sering dikemukakan oleh Hobbes, yang menyatakan bahwa Negara merupakan kekuasaan sentral.

Hamim,³⁶ ketika melihat fakta politik kaum Islam Militan³⁷ yang dengan keras berusaha *merevitalisasi* asas dasar Islam dalam kehidupan bernegara. Beliau mengatakan bahwa dalam konteks sistem perpolitikan seperti sekarang ini, hal itu sangatlah sulit untuk dicarikan landasan argumentasinya.³⁸

Dalam melihat masalah ini, Kamaruzzaman menyatakan bahwa bentuk hubungan Agama (Islam) dan Negara adalah tidak dapat dipisahkan.³⁹ Beliau juga menolak faham sekulerisme Nurcholish Madjid yang mengatakan bahwa : “Negara Islam itu *inklusif* tidak *eksklusif*.”⁴⁰

Polemik agama dan negara, meskipun telah melahirkan bermacam teori dengan paradigma yang beragam, akan tetapi belum juga memperoleh satu titik temu, yang selanjutnya menjadi teori baku tentang bentuk sebuah negara dalam pandangan Islam. Hal inilah yang mendorong penyusun untuk melakukan penelitian terhadap pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais tentang relasi Islam dan negara, karena sejauh pengetahuan penyusun, belum ada skripsi

³⁶ Thaha Hamim, *Islam dan NU: Dibawah Tekanan Problematika Kontemporer Dialektika Kehidupan Politik, Agama, Pendidikan dan Sosial Masyarakat Muslim*, (Surabaya: Diantama Press, 2004), hlm.4

³⁷ Kaum Islam Militan, beliau mengambil satu contoh Laskar Jihad *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, yang lebih memiliki *preferensi* kepada institusi khilafah daripada institusi kepresidenan yang dihasilkan oleh sistem ketatanegaraan modern.

³⁸ Sistem ketatanegaraan Islam (khilafah) dalam pengertian beliau sebenarnya tidak termasuk kedalam doktrin keagamaan, tapi kategorinya masuk kedalam institusi sosial. Alasan lebih jauh lagi beliau menganggap bahwa konsep khilafah selalu berubah secara dinamis. Khilafah yang terbentuk dengan nuansa yang demokratis pada masa *al-Khulafa al-Rāshidun* (632-661 M) berubah menjadi *autocratic monarchi* dizaman dinasti-dinasti Islam pasca al-Khulafa al-Rāshidun (661-1924 M). Alasan lain karena institusi khilafah selalu berevolusi, sesuai dengan kodratnya sebagai institusi sosial.

³⁹ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perpektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: IndonesiaTERA, 2001), hlm.129

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.121, dan Kamaruzzaman, *Mengapa demokrasi Agama diIndonesia : Perspektif Sitem Politik Islam*, (Jakarta: Profetika, 2000), hlm.37-55

atau karya sastra lainnya yang mengangkat tema pokok dalam skripsi ini sebagai satu kajian keilmuan.

E. Kerangka Teoretik

Perdebatan menarik seputar Relasi Islam dan Negara ternyata masih menjadi pembahasan menarik dalam kalangan cendekiawan muslim Timur dan Barat. Jalinan hubungan yang teramat rumit, memunculkan berbagai corak pemikiran baik yang mendukung maupun yang menolak konsep Negara Islam dengan berbagai alasan dan sudut pandang yang berbeda-beda.

Perbedaan itu muncul bukan hanya disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis *an-sich*, namun terdapat juga aspek *teologis-doktrinal* dalam hal ini. Islam sebagaimana kita tahu telah mempunyai konsep “*khalifah, daulah dan hukumah*” tetapi Al-qur’an dan Sunnah belum memberikan penjelasan tentang konsep itu secara rinci.⁴¹ Sehingga dari sinilah akar perdebatan kontroversial seputar relasi Islam dan negara itu muncul diberbagai kalangan dan telah menjadi polemik yang berkepanjangan sampai dengan saat ini.

Munawir Sadzali menulis bahwa Islam adalah agama yng didalamnya tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.⁴² Beliau menjelaskan bahwa konsep yang menyebutkan

⁴¹ Didalam Al-qur’an maupun Hadist tidak disebutkan bagaimana sebenarnya bentuk dan perangkat instrumental sebuah Negara ataupun petunjuk tentang konsep tersebut. Alqur’an hanya memebrikan petunjuk yang sifatnya umum, agar umat Islam mencari penyelesain dalam masalah-masalah bersama melalui musyawarah, itupun tidak menyebutkan pola yang baku tentang bagaimana musyawarah itu seharusnya dilaksanakan.

⁴² Munawir Sadzali, *Islam dan Tatanegara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 235-236

bahwa Islam adalah agama *paripurna* yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk sistem pemerintahan dengan merujuk kepada pola politik semasa *al-Khulafā' al-Rāsyidūn* adalah sebuah observasi yang salah.⁴³ Alasan beliau bahwa hal itu akan sarat dengan kontradiksi dan sukar dilaksanakan dalam kondisi masyarakat sebuah negara yang majemuk.

Sejarah menunjukkan bahwa latar belakang sosio-kultural akan memiliki pengaruh yang sangat dominan terhadap pola pembentukan *jurisprudence* hukum. Begitu juga kerangka berfikir dan menfanalisa problematika kontemporer yang berkembang. Artinya bahwa teks dan konteks masalah yang terjadi sekarang, tidak selamanya dapat *dianalogkan* kepada konteks yang telah lalu. Habieb Rizieq Shihab⁴⁴, dengan mengutip perkataan Al-Ghazali, mengatakan:

“... Bahwa agama adalah pondasi, pemerintah sebagai penjaganya. Apa-apa yang tidak ada pondasinya pasti akan rapuh. Dan apa-apa yang tidk dijaga pasti akan hilang.”⁴⁵

Dari sini nampak jelas pemikiran beliau bahwa menurutnya antara agama dan negara (kekuasaan) tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini beliau tidak mencoba untuk bersikap menjadi salah satu dari kelompok yang saat ini muncul, yaitu kelompok *formalistik* maupun *substansialistik*. Dan beliau mencoba mengaitkan bagaimana substansi dari sebuah agama dapat dijalankan dengan jalan menjaganya secara formal. Analisa ini berangkat dari sebuah asumsi bahwasanya

⁴³ *Ibid.*, hlm.234

⁴⁴ Beliau adalah ketua Front Pembela Islam (FPI), salah satu organ Islam yang juga getol bersuara nyaring menuntut ditegakkannya Syari'at Islam di Indonesia.

⁴⁵ Habieb Rizieq Shihab, *Jika Syari'at Islam, maka jadi Negara Islam*. Dalam jurnal Tashwirul Afkar. *Deformulasi syari'at Islam...*, (Jakarta: Lakpesdam NU-TAF, 2002), Edisi No.12, hlm.99

Islam itu terdiri dari unsur aqidah, syari'at dan akhlaq, yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Epistimologi rasional selalu menuntut untuk berfikir secara holistik, keseluruhan dan tidak parsial. Sehingga praktis epistimologi rasional ini menyelamatkan umat Islam dari sekulerisasi yang berimplikasi pada pemisahan agama dan negara secara total.⁴⁶

F. Metode Penelitian

Dalam upaya memperoleh analisa yang jelas, rinci dan sistematis atas permasalahan ini, penyusun menggunakan beberapa metodologi, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang digunakan dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data primer dan sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah *Komparatif Analitik*. Komparatif adalah metode yang digunakan untuk mengungkap pendapat yang berbeda kemudian membandingkannya dengan pendapat lain yang berbeda baik secara teori maupun metodologi, untuk kemudian diambil sebuah

⁴⁶ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam, Cet. 2*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm.27

kesimpulan. Analisis adalah menguraikan suatu persoalan secara cermat dan terarah.⁴⁷

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *Normatif Historis*. Yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam menganalisa sebuah objek kajian dengan menekankan pada kebenaran dan ketepatan suatu argumentasi yang dijadikan pijakan dengan kaidah yang ada diletakkan pada *spektrum* yang lebih luas, yaitu latar belakang *sosio-kultural* masyarakatnya.

4. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan data-data sebagai referensi, yang penyusun kelompokkan menjadi dua kategori data, yang meliputi: sumber data primer yang penyusun ambil dari buku berjudul: *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*, karya M. Amien Rais⁴⁸ dan buku karya Nurcholish Madjid yang berjudul: *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern; respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*.⁴⁹ Serta sumber data sekunder yang penyusun ambil dari buku-buku, artikel maupun karya tulis yang masih memiliki korelasi baik langsung maupun tidak langsung dengan tema pokok dalam skripsi ini.

⁴⁷ M.Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.63

⁴⁸ M. Amien Rais, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1998)

⁴⁹ Nurcholish Madjid, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respons dan Transformasi Nilai – nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta; PT. Media Cita, 2000)

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara yang digunakan dalam menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu, sehingga dapat diambil sebuah *konklusi* yang konkrit mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

Analisis data yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah analisis data *kualitatif* dengan metode *komparatif*. Yaitu menganalisa data yang tersedia dan membandingkannya dengan pokok-pokok teori lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami pokok-pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka secara sistematis penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan penelitian lebih mendalam tentang kehidupan serta pemikiran Nurcholish Madjid, yang meliputi biografi, pendapat beliau tentang usaha revitalisasi konsep negara Islam oleh sekelompok Islam Militan, serta pemikiran – pemikiran beliau tentang relasi Islam dan negara dalam konteks ke-Indonesiaan saat ini.

Bab ketiga merupakan penelitian terhadap kehidupan M. Amien Rais, yang berupa latar belakang sosial, pendidikan serta karya – karya beliau, dan dibahas pula secara lebih mendalam pemikiran – pemikiran beliau tentang politik dalam

pandangan Islam, pandangan sekulerisme agama dan bagaimana seharusnya Islam menempatkan diri didalam pluralitas kehidupan politik Nasional di Indonesia saat ini.

Bab keempat merupakan *analisis komparatif* pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais tentang relasi Islam dan negara, yang meliputi pandangan kedua tokoh terhadap politik, usaha – usaha sekelompok militan Islam dalam merevitalisasi konsep Negara Islam, serta pandangan kedua tokoh terhadap bentuk negara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dari semua analisis yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya dan saran-saran yang diperlukan sebagai acuan perbaikan bagi pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan tema pokok skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membaca, mempelajari, dan memberikan analisa pemikiran Nurcholish Madjid dan Amien Rais tentang Relasi Islam dan Negara berikut latar belakang teori dari masing-masing tokoh, maka dapat diambil beberapa kesimpulan penting, yaitu :

1. Didalam agama Islam tidak disebutkan bentuk baku sebuah negara, baik dalam Al-qur'an maupun Sunah Rasul, jadi tidak ada kewajiban bagi seorang atau sekelompok Muslim untuk mendirikan Negara Islam dan menjadikan Islam sebagai ideologi negara.
2. Dalam pandangan Amien Rais, bentuk sebuah negara hanyalah bersifat formalistik, bukan menjadi persoalan bahwasanya negara itu disebut Sosialis, Pancasila atau apa saja. Negara akan dipandang baik jika suatu negara sudah menjalankan suatu *etos* Islam, kemudian menegakkan keadilan, sosial, menciptakan masyarakat yang *egalitarian*, yang jauh dari eksploitasi manusia terhadap manusia maupun golongan lainnya.
3. Dalam konteks yang sama, Nurcholish Madjid memberikan dasar-dasar teologis atau filosofis format Politik Ketatanegaraan Islam, yang lebih memperhatikan isi (*substance*) daripada bentuk (*Form*) dan bersifat kultural serta *dekonvensional*.
4. Modernisme dan wacana pembaharuan Islam, yang selalu diidentikkan dengan *sekularisasi* menjadi elemen kunci pemikiran Politik ketatanegaraan

Nurcholish Madjid untuk *me-reform* hubungan agama dan Negara di Indonesia pada khususnya.

5. Dalam pandangan Amien Rais, konsep sekulerisme apapun bentuknya, merupakan paham yang tertolak didalam agama Islam. Nilai ajaran Islam *qongruent* (sama dan sebangun) dengan nilai kemanusiaan yang luhur dan universal, lengkap dan komprehensif. Jadi upaya mendikotomisasi permasalahan agama dengan urusan politik menurut beliau tidak dapat diterima.

B. Saran – Saran

Setelah mempelajari dan melakukan analisa terhadap beberapa teori ketatanegaraan, khususnya Nurcholish Madjid dan Amien Rais, perlu kiranya penulis memberikan beberapa saran :

1. Dalam menciptakan dinamisasi dan kondusifitas iklim perpolitikan Nasional saat ini, perlu kiranya ada kesefahaman diantara para tokoh dan cendekiawan dengan menawarkan konsep baku dan terperinci tentang bentuk negara didalam Islam.
2. Realitas empiris dan kondisi sosio kultural merupakan satu faktor yang mempengaruhi sebuah analisa tokoh yang pada perkembangan selanjutnya menjadi satu teori baru didalam khasanah keilmuan Islam.
3. Epistimologi rasional selalu menuntut untuk berfikir secara holistik, keseluruhan dan tidak parsial. Landasan inilah yang seharusnya menjadi pijakan para cendekiawan dalam menanggapi dan merespon segala dinamika

sosial yang berkembang secara dinamis terkait masalah politik kenegaraan pada khususnya.

4. Islam adalah agama Universal, didalamnya termuat kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan tuhan-Nya. Artinya, pemisahan Agama dan Negara, berfikir parsial terhadap satu persoalan keduniawian, hanya akan menciptakan manusia modern yang berjiwa pecah (*split personality*).
5. Campur tangan agama dalam urusan kenegaraan, pada dasarnya bukan menjadi penyebab adanya stagnasi pembangunan. Hal ini akan kembali pada individu-individu pelaksananya. Fakta sejarah membuktikan bahwa Islam pernah mengalami zaman keemasannya ditangan kekholifahan Islam.
6. Penulis menyadari bahwa penelitian dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga pada penelitian-penelitian selanjutnya penulis berharap dapat memberikan koreksi dan deskripsi dengan analisa yang lebih baik sebagai satu kajian keilmuan Islam, kaitannya tentang Relasi Islam dan Negara.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk, kemampuan dan segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini, dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an

Departemen RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama, 1996

B. Kelompok Fiqih

Syafe'iy, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

C. Kelompok Buku Lain

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1995

Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, Pustaka Antara-The Ford Foundation, 1999

Geertz, Clifford, *Politik Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1992

Hamid, Abd. Qadir, Tijani, *Pemikiran Politik Islam Dalam Al-qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Hidayat, Kamaruddin, *Kata Pengantar dalam: Nurcholish Madjid, Islam agama Peradaban, Membangun Makna dn Relevansi Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1985

Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, Bandung: Mizan, 1996

Ismail, Faisal, *Islam Idealitas Ilahiyyah dan Realitas Insaniyyah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Group, 1999

Jamaluddin, Deddy, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998

Kamaruzzaman, *Mengapa demokrasi Agama diIndonesia : Perspektif Sistem Politik Islam*, Profetika, 2000

Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara : Perpektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: IndonesiaTERA, 2001

Karim, Rusli, M, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999

- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997
- Ma'arif, Syafe'iy, *Islam dan Politik; Teori Belah Bambu*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Madjid, Nurcholish, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern : Respons dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: PT. Media Cita, 2000
- _____, *Dialog Keterbukaan: Artikulasi nilai-nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 1998
- _____, *Khasanah Intelektual Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Nadroh, Siti, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Natsir, Moehammad, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Bandung: Pimpinan Fraksi Masyumi dalam Konstituante, 1957
- Pikri, A, *50 Alasan Mengapa Memilih Amien Rais*, Jakarta: Permata Nusantara, 2004
- Pulungan, Suyyuti J, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari pandangan Al-qur'an*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996
- Rais, Amien, *Putra Nusantara: Mohammad Amien Rais*, Singapore: Stanford Press, 1999
- _____, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan, 1998
- _____, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1987
- _____, *Menyembuhkan Bangsa yang Sakit*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999
- Ridwan, Deden, M, *Gagasan Nurcholish Madjid: Neo Modernisme Islam Dalam Wacana Tempo dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Belukar Budaya, 2002

Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1996

Santoso, Edy, Agus, *Tidak ada Negara Islam; Surat-surat Politik Nurcholish Madjid-Mohammad Roem*, Jakarta: Jambatan, 1997

Shihab, Rizieq, Habib, *Jika Syari'at Islam , maka jadi Negara Islam. Dalam jurnal Tashwirul Afkar. Deformulasi syari'at Islam*, Jakarta: Lakpesdam NU-TAF, 2002

Sumargono, Ahmad, *Saya Seorang Fundamentalis*, Bogor: Global Citra Press (GCP), 2000

Syam, Firdaus, *Amien Rais Politisi Yang Merakyat Dan Intelektual Yang Shaleh*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003

Yahya, Suhelmi, *Polemik Negara Islam Soekarno versus Natsir*, Jakarta: Teraju, 2002

D. Kelompok Artikel dan Majalah

Panji Masyarakat, No. 843 Tahun XXXVI / 15 – 30 November 1995

Suara Gemilang, No. 34 Tahun 7 – Oktober 2003

Arrisalah, Edisi XXXX / Th. XVI / 2003

TERJEMAHAN

Hlm.	Surat (ayat)	TERJEMAH
		BAB I
2	al-Hujurāt (10)	Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.
		BAB III
51	al-Ghāsyiyah (21-22)	Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan (21) Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka (22)
52	al-Bāqarah (256)	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut (;syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah SWT), dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Lampiran 2

BIOGRAFI NURCHOLISH MADJID DAN M. AMIEN RAIS

A. NURCHOLISH MADJID

Tempat Tgl. Lahir : Jombang, 17 Maret 1939 M (28 Muharam 1358 H)

Pendidikan :

1. Madrasah al-Waṭḥāniyah dan Sekolah Rakyat (SR) Mojo Anyar, Jombang (tahun 1948)
2. Pondok Pesantren Dārul ‘Ulūm Rejoso Jombang (1950)
3. Pondok Pesantren Gontor (1955)
4. Kulliyat al-Mu’allimīn al-Islāmiyah / KMI (1960)
5. IAIN Syarif Hidayatullah, Jurusan Sastra Arab dan Sejarah Pemikiran Islam, Fakultas Adab (1968)
6. Universitas Chicago, AS (1978 – 1984).

Organisasi :

1. Ketua umum HMI dua periode (1966-1971)
2. Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara “PEMIAT” (1967-1969)
3. Wakil Sekjen IIFSO (*Internasional Islamic Federation of Student Organisation*) (tahun 1969-1971)

Karier :

1. Peneliti di LEKNAS LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), tahun 1969-1978.
2. Pemimpin Umum majalah Mimbar Jakarta (1971-1974)
3. Direktur LSIK Jakarta (1973-1976)
4. Direktur Lembaga Kebajikan Islam Samanhudi Jakarta (1974-1992)
5. Guru besar di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1998)
6. Direktur Yayasan Wakaf Paramadina (2002)

Karya – karya :

1. *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern : Respons dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani* (Jakarta, PT. Media Cita, 2000);
2. *Khasanah Intelektual Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986);
3. *Islam Kemodernan dan ke Indonesiaan* (Bandung; Mizan, 1988);
4. *Islam Doktrin dan Peradaban; sebuah telaah kritis tetang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992);
5. *Islam Kerakyatan dan ke Indonesiaan* (Bandung: Mizan, 1993);
6. *Pintu – pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1994);
7. *Islam agama kemanusiaan, membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995);
8. *Islam Agama Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995);
9. *Kaki Langit Peradaban Islam* (Jakarta: Paramadina, 1997);
10. *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997);
11. *Perjalanan Religius Umrah dan Haji* (Jakarta: Paramadina, 1997);
12. *Bilik – bilik Pesantren* (Jakarta: Paramadina, 1997);
13. *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 1998);
14. *Cita – cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999);
15. *“the issue of Modernization amog Muslims in Indonesia: From a Partisipant’s Point of View”* (dalam Gloria Davies {ed.}), *What is Modern Indonesian Culture?* (Athen, University-of Ohio Southeast Asia Studies, 1979);
16. *“Islam in Indonesia: Challenges and Opportunities”* (dalam Cyriac K. pullapilly {ed.}), *Islam in the Contemporary World* (Notre Dame, Indiana, Cross Roads Book, 1980)

B. M. AMIEN RAIS

Tempat Tgl. Lahir : Kampung Kepatihan Kulon, RT.02/RW.05, Kecamatan
Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah, pada tanggal 26 April
1944 M.

Pendidikan :

1. SD Muhammadiyah Solo (1956)
2. SMP Muhammadiyah Solo (1959)
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah di Solo (1962)
4. Jurusan Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1967)
5. Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 1968
6. Notre Dame University (1974)
7. University of Chicago (1984)
8. Pelajar khusus (*Dirāssah Khāssah*) di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir (tahun 1981)
9. Post Doctoral di George Washington University dan UCLA, Amerika Serikat (1988-1989)

Organisasi :

1. Ketua 'Hisbul Waṭhān' (1957)
2. Anggota Komite Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada tahun 1963-1965
3. Sekretaris LDMI HMI, Yogyakarta (1965)

Karier :

1. Wakil Ketua Muhammadiyah (1990)
2. Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 1995-2000
3. Pendiri dan ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tahun 1998
4. Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1974)
5. Ketua MPR RI (1998-2004)

Karya – karya :

Penelitian :

1. Prospek Perdamaian Timur Tengah 1980 – an (Litbang Deplu RI)
2. Perubahan Politik Eropa Timur (Litbang Deplu)
3. Kepentingan Nasional Indonesia dan Perkembangan Timur Tengah 1990–an (Litbang Deplu)
4. Zionisme: Arti dan Fungsi (Fisipol, UGM)

Buku – buku :

1. Orientalisme dan Humanisme Sekuler (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1983)
2. Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah (PAU-UGM)
3. Tugas Cendekiawan Muslim [Terjemahan Ali Syariati] (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1985)
4. Cakrawala Islam, Antara Cita dan Fakta (Bandung: Mizan, 1987)
5. Politik Internasional Dewasa ini (Surabaya: Usaha Nasional, 1989)
6. Timur Tengah dan Krisis Teluk (Surabaya: Amarpress, 1990)
7. Keajaiban Kekuasaan (Yogyakarta: Bentang Budaya-PPSK, 1994)
8. Moralitas Politik Muhammadiyah (Yogyakarta: Penerbit Pena, 1995)
9. Tangan Kecil (Jakarta: UM Jakarta Press, 1995)
10. Demi Kepentingan Bangsa (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
11. Visi dan Misi Muhammadiyah (Yogyakarta: Pustaka SM, 1997)
12. Refleksi Amien Rais, dari persoalan semut sampai gajah (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
13. Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
14. Mengatasi Krisis dari Serambi Masjid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
15. Melangkah Karena Dipaksa Sejarah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
16. Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan (Bandung: Mizan, 1998)

17. Membangun Politik Adiluhung: Membumikan Tauhid Sosial, Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998)
18. Membangun Kekuatan di Atas Keberagaman (Yogyakarta: Pustaka SM, 1998)
19. Suara Amien rais, Suara Rakyat (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
20. Amien Rais Sang Demokrat (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
21. Amien rais Menjawab Isu-isu Politik Kontroversialnya (Bandung: Mizan, 1999)
22. Melawan Arus: Pemikiran dan Langkah Politik Amien rais (Jakarta: Serambi, 1999).

DATA PRIBADI

Nama : Nurcahyono
Tempat Tgl. Lahir : Magelang, 06 Maret 1981
Alamat : Bakalan, Sawangan, Magelang 56481
Orang Tua : Bp. Taryono (*Alm.*) – Ibu Rakhimah
Agama : Islam

Pendidikan Formal :

1. TK ABA Ngentak, Sawangan (1988 – 1990)
2. MIM Sawangan (1990 – 1995)
3. SMP N I Sawangan (1995 – 1997)
4. SMA N I Kota Mungkid Magelang (1997 – 1999)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000 – 2007)

Pengalaman Organisasi :

1. Divisi Keagamaan OSIS SMUN I Kota Mungkid MGL ; 1998 – 1999
2. Sekjen DPC PAN Sawangan Kab. Magelang ; 2001 – 2006
3. Pengurus Teater EsKa, Sunan Kalijaga Yogyakarta ; 2001 – 2003
4. Komunitas Tarung Deradjat IAIN SuKa Yogyakarta ; 2001 – 2002
5. Pengurus KARISMA (Keluarga Mahasiswa Magelang) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ; 2001 – 2004
6. Dewan Presidium Solidaritas Mahasiswa Magelang Peduli Rakyat (SOMMPRET) ; 2002 – Sekarang
7. Pengurus KNPI Kabupaten Magelang ; 2003 - 2005
8. Pendiri Lembaga Maskumambang 'Membangun Bangsa' ; 2004
9. Koordinator Departemen Advokasi dan Pengembangan Program Maskumambang Periode ; 2004 – 2008